

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Semarang

Halaman 4

## BPK Temukan 8 Kegiatan Tak Patuh UU

### ■ Pengelolaan Keuangan Daerah 2017

UNGERAN - Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan standar penilaian internal yang belum memadai dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2017.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

"Ada empat kriteria penilaian, yakni standar akuntansi pemerintah, standar penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap undang-undang. Ternyata dua kriteria menjadi temuan BPK, yaitu 9 temuan standar penilaian internal (SPI) dan 8 kepatuhan terhadap undang-undang," ungkap Jauhari, Selasa (24/7).

Adapun delapan temuan berdasarkan LHP BPK atas SPI antara lain penatausahaan pajak

penghasilan pasal 21 atas pegawai belum sepenuhnya memadai, pengendalian atas pengelolaan pendapatan pajak daerah belum sepenuhnya memadai, dan lainnya.

Sedangkan sembilan temuan atas kepatuhan perundang-undangan antara lain pemungutan retribusi izin gangguan senilai Rp 2.442.413.640 tidak sesuai Permenagri No 19 Tahun 2012, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru di Disdikbudpora sebesar Rp 90.177.785, dan lainnya.

"Mengacu PP No 69 Tahun 2010, PDAM hanya bisa mengambil retribusi maksimal 5 persen. Tapi dalam perjanjian pemungutan retribusi sampah antara DLH dengan

PDAM, ternyata PDAM minta 10 persen. Ini tidak patuh terhadap undang-undang," tandas Jauhari.

Sehubungan itu, Jauhari meminta Pemkab Semarang khususnya bupati bersama jajarannya agar betul-betul konsentrasi dan sungguh-sungguh dalam mengawal pemerintahan. Sehingga ke depan tidak ada lagi temuan-temuan dari BPK.

"Meskipun mendapat opini WTP, kenyataannya masih banyak temuan dari BPK sehingga masih ada PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan. Bupati agar lebih konsentrasi dalam menjalankan pemerintahan agar ke depan lebih baik," tegasnya.

Menurut Jauhari, adanya kelebihan anggaran atau pemungutan retribusi yang tidak sesuai ketentuan sudah dikembalikan ke kas daerah semuanya. Pengembalian itu dilakukan setelah diperiksa oleh BPK terdapat temuan.

"Jadi setelah diperiksa BPK ada yang tidak sesuai undang-undang akhirnya dikembalikan.

Semua sudah dikembalikan, tapi dalam menjalankan fungsinya belum sesuai undang-undang," ujarnya.

Ketua Fraksi Hanura, Kusulistyo menilai LKPD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak pas. Sebab dalam pengelolaan keuangan daerah masih ada temuan BPK.

"Masih ada temuan kok dapat opini WTP, saya kira tidak pas. Kalau WTP itu semestinya clear, tidak ada catatan atau temuan," tegas Sulis, panggilan akrab Kusulistyo.

Sulis menandaskan, temuan BPK itu harus disikapi serius. Seharusnya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan.

"Bupati selaku penanggung jawab atas kinerja OPD harus menyikapi, jangan asal menempatkan pegawai. Kalau penempatan pegawai tidak proposional akibatnya ya seperti itu," tandasnya. ■

rbd-Yn